

**Analisis Determinasi Kinerja Pemerintah
(Studi Kasus Pada Badan Dan Dinas Di Kabupaten Jember)**

Erica Efif Lalinda¹

ericaefff@gmail.com

Oryza Ardhiarisca²

Oryza_Risca@gmail.com

Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain the effect of implementing performance-based budgeting, accuracy of budget targets and internal control on the performance of The Jember Regency government. This research is a quantitative research. The population of this research is all regional apparatus including Agencies, Departments, Districts, Inspectorates, DPRD Secretariat and Regional Secretariat in Jember Regency. The sampling technique in this research used a purposive sampling method, with collaboration between the Department and Agency so that a sample of 23 Departments and 6 Agencies was obtained with a total of 87 respondents. The data source in this research is primary data using a questionnaire with a Likert scale. The statistical tool used to test the hypothesis is the IBM Statistics 21 application. The results of the analysis show that independent variables partially or simultaneously, namely the implementation of performance-based budgeting, budget targets and internal control, have a significant effect on the performance of the Jember Regency government.

Keywords : *Performance-based budgeting; Accuracy of Budget Targets; Internal control; Government Performance.*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara yang membahas penyusunan rencana kerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi penganggaran di sektor publik, dengan fokus evaluasi kinerja dan hasil. Kinerja adalah kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi kinerja penting untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan output program. Pemerintah daerah, sebagai organisasi sektor publik, bertanggung jawab menyediakan layanan dan perlindungan bagi masyarakat serta mengelola berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pembangunan ekonomi.

Anggaran yang berbasis kinerja merupakan metode perencanaan keuangan yang fokus pada hasil yang ingin dicapai organisasi dan terhubung secara langsung dengan tujuan, misi, dan rencana strategis yang telah ditetapkan (Bastian, 2013). Tujuannya adalah memastikan hasil program sesuai dengan anggaran yang digunakan dengan kuantitas dan kualitas terukur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Israr dan Syofyan (2022) menyimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah kota Surabaya. Kebijakan penggunaan anggaran di pemerintah daerah diharapkan memberikan ketepatan dalam penggunaan anggaran, pertanggungjawaban terhadap kegiatan, biaya yang digunakan, dan hasil yang dicapai, untuk mencapai sasaran kinerja dalam penggunaan anggaran.

Ketepatan sasaran anggaran berhubungan dengan tujuan pada setiap program dalam mencapai targetnya untuk menilai kinerja pembangunan dan program pemerintah. Rencana Kerja Anggaran yang tertunda dapat menyebabkan masalah dalam mencapai target sesuai Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2023. Anggaran adalah estimasi kinerja dalam ukuran finansial, seperti yang disampaikan Mardiasmo (2018). Pemerintah daerah memperbaiki kinerja melalui pengendalian internal, yang tercermin dalam tata kelola yang baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mengatur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai proses integral dalam mencapai tujuan

organisasi, termasuk efektivitas, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan. Menurut Schandl & Foster (2019) komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian Israr dan Syofyan (2022) menunjukkan bahwa pengendalian internal memengaruhi kinerja instansi pemerintah kota Surabaya.

Pemerintah Kabupaten Jember beroperasi dalam kerangka otonomi daerah, yang memberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016. Bertujuan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran, dan pengendalian internal agar pemerintah dapat mencapai kinerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian Israr dan Syofyan (2022) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran, dan pengendalian internal dengan kinerja pemerintah kota Surabaya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Stewardship

Menurut James H. Davis (1997) teori Stewardship menekankan bahwa manajer sebagai Steward fokus pada kepentingan bersama atau tujuan organisasi, bukan keinginan pribadi. Asumsi penting dari stewardship adalah bahwa manajer harus mengarahkan tujuan mereka sesuai dengan tujuan pemilik yakni untuk kepentingan pemilik, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan. Teori Stewardship menekankan pentingnya hubungan antara steward (pemerintah) dan *principle* (masyarakat) dalam mencapai tujuan organisasi, yang dapat mempengaruhi kinerja dan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat (Try Sutriani et al., 2022). Implikasi teori stewardship pada organisasi sektor publik adalah dalam konteks pelayanan. Teori ini menekankan tanggung jawab dan capaian kinerja yang dimiliki oleh para pemimpin dan pelaku pelayanan dalam menjaga organisasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan publik.

2.2. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan memastikan hubungan yang erat antara hasil kegiatan/program dengan penggunaan anggaran yang terukur secara kuantitas dan kualitas. Visi, misi, dan rencana strategis harus diuraikan secara rinci untuk menghasilkan program, subprogram, dan proyek yang relevan. Penggunaan indikator penerapan anggaran berbasis kinerja yakni menggunakan 4 tahap siklus anggaran sesuai Mardiasmo (2018) yakni tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan serta evaluasi.

2.3. Ketepatan Sasaran Anggaran

Kementerian Keuangan RI No. 62 Tahun 2023 yang membahas Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait Rencana Kerja Anggaran dapat terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran anggaran namun apabila penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah. Penggunaan indikator ketepatan sasaran anggaran menggunakan 7 indikator yakni tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi (Locke & Latham, 1984).

2.4. Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 yang membahas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ialah proses yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tindakan dan aktivitas yang terus-menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staf untuk memastikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan-perundang-undangan. Komponen pokok dalam pengendalian internal menurut *The Committee of Sponsoring Organization* (COSO 2013) antara lain lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

2.5. Kinerja

Pemerintah daerah adalah organisasi sektor publik yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan perlindungan kepada masyarakat di wilayahnya serta bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara. Kinerja ialah alat untuk mengukur atau menilai kesuksesan organisasi. Masyarakat akan mengukur keberhasilan lembaga sektor publik dengan menilai kemampuannya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi namun terjangkau secara relatif (Mahmudi, 2015). Indikator kinerja yang digunakan adalah efektivitas, efisiensi, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan pegawai.

2.6. Penelitian Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kinerja Pemerintah

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, serta untuk mendapatkan alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (Verasvera, 2016). Menurut teori Stewardship, peran pemerintah sangat penting dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk hubungan antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah (pengurus), yaitu melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dalam instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus mengoptimalkan kinerja dengan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat agar program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Israr & Syofyan (2022), Wahdatul et al. (2016) dan Anugerahani et al. (2013) membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja Instansi pemerintah daerah.

H1 : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan pada Kinerja Pemerintah.

2.6.2 Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Pada Kinerja Pemerintah

Ketepatan anggaran mengacu pada tujuan spesifik dari rencana keuangan, yang melibatkan estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan yang diproyeksikan untuk mendanai kegiatan selama periode tertentu. Dalam konteks ini, teori stewardship menempatkan manajer atau pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran. Tanggung jawab ini mencakup memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien guna meningkatkan ketepatan sasaran anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Israr & Syofyan (2022), Sadeli (2019) dan Dewi & Supadmi (2015) membuktikan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

H2 : Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan pada Kinerja Pemerintah.

2.6.3 Pengaruh Pengendalian Internal Pada Kinerja Pemerintah

Ketepatan anggaran mengacu pada tujuan spesifik dari rencana keuangan, yang melibatkan estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan yang diproyeksikan untuk mendanai kegiatan selama periode tertentu. Dalam konteks ini, teori stewardship menempatkan manajer atau pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran. Tanggung jawab ini mencakup memastikan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien guna meningkatkan ketepatan sasaran anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Israr & Syofyan (2022), Azlina & Amelia (2015), Supriatna (2016), dan Vitriany & Subardjo (2020) telah membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al.,

2022) membuktikan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas dengan didukung oleh peneliti sebelumnya, rumusan hipotesis yang digunakan adalah:

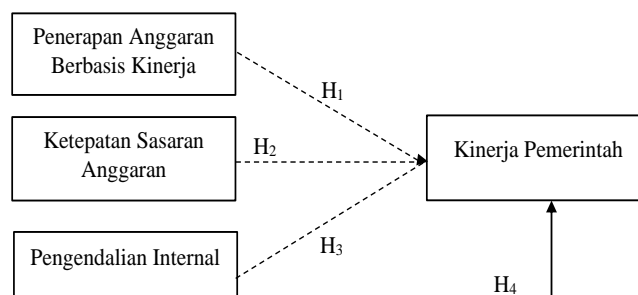
H3 : Pengendalian Internal berpengaruh signifikan pada Kinerja Pemerintah.

2.6.4 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Internal Secara Simultan Berpengaruh Pada Kinerja Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut dapat tercapai jika terdapat program kerja yang baik, sehingga diperlukan perencanaan strategis dalam menyusun kegiatan dengan memperhatikan anggaran agar alokasinya efektif dan efisien dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Anggaran berbasis kinerja dapat membantu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan memfokuskan alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Ketepatan sasaran anggaran memastikan bahwa program dan kegiatan yang didanai benar-benar relevan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu, pengendalian internal yang baik membantu instansi pemerintah memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan ketiga faktor tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik yang diberikan. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dalam konteks pelayanan, yang menekankan tanggung jawab dan pencapaian kinerja oleh para pemimpin dan pelaku pelayanan dalam mempertahankan organisasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk kepentingan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Israr & Syofyan (2022) menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran, dan pengendalian internal secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Surabaya.

H4 : Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan pada Kinerja Pemerintah



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi IBM Statistics 21. Rancangan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan variabel independen yakni penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah sebagai variabel dependen. Populasi dan Sampel penelitian ini menggunakan 23 Dinas dan 6 Badan di Kabupaten Jember mempunyai 3

responden yaitu Kepala Dinas atau Badan, Bagian Keuangan, dan Bagian Sekretariat di masing-masing Badan dan Dinas dengan jumlah keseluruhan 87 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yakni menggunakan purposive sampling atau kriteria tertentu dengan pembatasan badan dan dinas. Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu pihak pengelola yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban APBD sesuai pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Uji Kualitas Data

Uji Validitas

taraf signifikansi yakni 0,05 dan diketahui nilai signifikansi dari tiap variabel independen senilai 0,00. Dinyatakan valid apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka menunjukkan bahwa pada tiap butir pertanyaan dalam variabel dinyatakan valid dan dapat dibagikan kepada responden .

Uji Realibilitas

hasil uji reabilitas pada tiap variabel Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Kinerja dinilai reliabel yakni nilai α (0,823; 0,915; 0,813; 0,8430 lebih rendah dari nilai Cronbach's Alpha yaitu 0,6. Sehingga dapat menunjukkan terhadap responden kestabilan dan kekonsistenan saat pengisian kuesioner.

4.2. Analisis Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

hasil dari uji normalitas, yakni data terdeteksi normal apabila nilai taraf signifikansi 0,05 lebih kecil dari nilai Asymp.sig. Sesuai hasil SPSS pada taraf signifikansi 0,05 dengan nilai asymp. Sig. 0,461 menunjukkan $0,05 < 0,461$ sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan kriteria apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sesuai hasil SPSS pada variabel yakni penerapan anggaran berbasis kinerja (X^1) nilai sig. sebesar 0,899, ketepatan sasaran anggaran (X^2) nilai sig. sebesar 0,216 dan pengendalian internal (X^3) nilai sig. sebesar 0,589 lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel independen tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolineritas

hasil uji multikolineritas pada nilai Tolerance variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X^1) sebesar 0,306, ketepatan sasaran anggaran (X^2) sebesar 0,448 dan pengendalian internal (X^3) sebesar 0,285 lebih dari nilai 0,¹ dan nilai VIF variabel penerapan anggaran berbasis kinerja (X^1) sebesar 3,268, ketepatan sasaran anggaran (X^2) sebesar 2,232 dan pengendalian internal (X^3) sebesar 3,508 kurang dari nilai 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas pada data penelitian dan tidak terjadi kaitan yang linear antar variabel bebas

4.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Koefisien Regresi
Konstan	2,107
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja X_1	2,632
Ketepatan Sasaran Anggaran X_2	2,213
Pengendalian Internal X_3	3,454

Sumber: Data diolah, 2023

Terkait hasil uji regresi linear berganda, sehingga dapat dibuat perhitungan atas persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,107 + 2,632X_1 + 2,213X_2 + 3,454X_3 + e$$

Atas perhitungan di atas dapat dijabarkan pada persamaan di atas nilai konstanta pada persamaan regresi linear berganda ialah 2,107, apabila pada variabel-variabel independen bernilai 0, maka variabel Y kinerja pemerintah akan bernilai 2,107. Kemudian, nilai koefisien variabel X^1 sebesar 2,632 apabila variabel X^1 terjadi kenaikan 1 satuan maka variabel Y kinerja pemerintah mengalami kenaikan sebesar 2,632. Selanjutnya nilai koefisien variabel X^2 sebesar 2,213 apabila variabel X^2 terjadi kenaikan 1 satuan maka variabel Y kinerja pemerintah mengalami kenaikan sebesar 2,213. Lalu nilai koefisien variabel X^3 sebesar 3,454 apabila variabel X^3 terjadi kenaikan 1 satuan maka variabel Y kinerja pemerintah mengalami kenaikan sebesar 3,454

4.4. Analisis Uji Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda (R²)

R	R Square	Adjusted R Square
0,829 ^a	0,688	0,676

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan nilai adjusted R Square ialah 0,676 atau 67,6%. Sehingga dapat disimpulkan variabel dependen yakni kinerja pemerintah dipengaruhi variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja (X^1), ketepatan sasaran anggaran (X^2) dan pengendalian internal (X^3) sebanyak 67,6%. Maka sebanyak 32,4% merupakan faktor lain yang tidak terindikasi dalam penelitian

4.5. Analisis Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 3. Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4440,619	3	1480,206	59,492	,000 ^b
Residual	2015,334	81	24,881		
Total	6455,953	84			

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan keterangan pada nilai sig. ialah 0,000. Apabila nilai sig. lebih rendah dari 0,05 bermakna hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan dari tabel di atas nilai sig 0,000 < 0,05 membuktikan bahwa anggaran berbasis kinerja (X^1), ketepatan sasaran anggaran (X^2) dan pengendalian internal (X^3) berpengaruh secara simultan pada kinerja pemerintah (Y).

Uji t (Parsial)

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel Bebas	Nilai Sig.	Taraf Sig.	Keterangan
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_1)	0,010	0,05	Berpengaruh signifikan
Ketepatan Sasaran Anggaran (X_2)	0,030	0,05	Berpengaruh signifikan
Pengendalian Internal (X_3)	0,001	0,05	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan keterangan variabel independen yakni anggaran berbasis kinerja

(X^1) nilai sig. sebesar 0,010 , ketepatan sasaran anggaran (X^2) nilai sig. sebesar 0,030 dan pengendalian internal (X^3) nilai sig. sebesar 0,001 yang secara parsial berpengaruh signifikan pada variabel dependen yaitu kinerja pemerintah (Y) karena lebih rendah dari taraf signifikan yang telah ditetapkan senilai 5% atau 0,05

4.6. Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mempengaruhi kinerja pemerintah secara signifikan. Maka pada penelitian ini H^1 diterima. Hasil uji hipotesis ini searah yang dilakukan oleh peneliti Israr dan Syofyan (2022) Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan jika penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki ikatan yang kuat terhadap kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran dari target kinerja yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan teori Stewardship yang menekankan bahwa tanggung jawab dan capaian kinerja yang dimiliki oleh steward atau pelaku pelayanan dalam mempertahankan organisasi dan menjalankan pelayanan yang terbaik untuk principle atau masyarakat. Maka semakin kuat penerapan indikator pada anggaran berbasis kinerja yakni tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap implementasi, tahap evaluasi dan pelaporan meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang maksimal

4.6.2 Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Pada Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah secara signifikan. Maka pada penelitian ini H^2 diterima. Hasil uji hipotesis ini searah yang dilakukan oleh peneliti Israr dan Syofyan (2022). Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan jika ketepatan sasaran anggaran memiliki ikatan yang kuat terhadap kinerja dalam mencapai tujuan dari rencana keuangan yang melingkupi perkiraan pengeluaran dan pendapatan yang telah diusulkan untuk menjalankan program kerja guna tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan teori Stewardship yang menekankan bahwa manajer atau pengelola bertindak sebagai steward atau pengelola yang dipercayakan untuk mengelola aset dan sumber daya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Sehingga semakin baik indikator ketepatan sasaran anggaran diterapkan yaitu antara lain tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, tingkat kesulitan hingga koordinasi maka akan memberikan pengaruh kinerja perangkat daerah dalam mensejahterakan masyarakat terealisasi dengan baik.

4.6.3 Pengaruh Pengendalian Internal Pada Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengendalian internal mempengaruhi kinerja pemerintah secara signifikan. Maka pada penelitian ini H^3 diterima. Hasil uji hipotesis ini searah yang dilakukan oleh peneliti Israr dan Syofyan (2022). Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan jika pengendalian internal memiliki ikatan yang kuat terhadap kinerja untuk memastikan bahwa pelaksana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan. Hal ini sejalan dengan teori Stewardship yang menekankan bahwa dilakukan pengendalian internal untuk melindungi aset organisasi, menghindari kecurangan otoritas, dan menggapai tujuan secara efisien dan efektif. Dengan demikian pengendalian internal mempercayakan steward atau pengelola bekerja dengan jujur dan tanggung jawab. Oleh karena itu, semakin baik indikator pengendalian internal diterapkan yaitu antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern maka akan memberikan keyakinan yang memadai dan mendorong pengaruh kinerja yang baik.

4.6.4 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Internal Secara Simultan Berpengaruh Pada Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan pada kinerja pemerintah. Maka pada penelitian ini H^4 diterima. Hasil uji hipotesis ini searah yang dilakukan oleh peneliti Israr dan Syofyan (2022). Secara simultan penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan baik, ketepatan sasaran anggaran telah akurat dan pengendalian internal dilaksanakan efektif

maka menghasilkan kinerja yang baik. Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan jika penerapan anggaran berbasis kinerja, ketepatan sasaran anggaran dan pengendalian internal memiliki ikatan yang kuat terhadap kinerja. Hal ini sejalan dengan teori Stewardship pada konteks pelayanan, yang menekankan pada tanggung jawab dan capaian kinerja yang dimiliki oleh para pemimpin dan pelaku pelayanan dalam mempertahankan organisasi dan menjalankan pelayanan yang terbaik untuk kepentingan publik. Dengan demikian steward atau pengelola aset memiliki tanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai sasaran kinerja yang telah ditetapkan agar mencegah kecurangan penyalahgunaan sumber daya.

5. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan telah dipaparkan untuk penelitian ini, dapat disimpulkan yaitu:

1. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja mempengaruhi Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja yang ditargetkan telah sesuai dengan rencana strategis dan visi misi kinerja organisasi.
2. Ketepatan Sasaran Anggaran mempengaruhi Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran yang tepat memberikan dasar bagi pengukuran kinerja yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan dari rencana keuangan yang melingkupi perkiraan pengeluaran dan pendapatan yang telah diusulkan untuk menjalankan program kerja guna tepat sasaran.
3. Pengendalian Internal mempengaruhi Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember secara signifikan. Hal ini menunjukkan jika pengendalian internal memiliki ikatan yang kuat terhadap kinerja untuk memastikan bahwa pelaksana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan.
4. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan pada Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan dengan baik, ketepatan sasaran anggaran telah akurat dan pengendalian internal dilaksanakan efektif menghasilkan kinerja yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Daerah, P. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016* (Vol. 2016).
- Damanhuri. (2006). *Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Hukum, 1993, 61–64.
- Israr, N. H., & Syofyan, E. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan. 4(4), 686–697.
- James H. Davis, F. D. S. dan L. D. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management.*” *Academy of Management Review*. *Academy of Management Review*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472*, 670.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1984). *Goal Setting. A motivational technique that works*. Prentice Hall. Inc Englewood.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Andi (ed.); Edisi Keem).
- Pemerintah. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA*. 1, 1–40.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (P. 3).
- Schandl, A., & Foster, P. L. (2019). COSO Internal Control - Integrated Framework: An Implementation Guide for the Healthcare Industry. COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, January, 5. PP.5
- Try Sutriani, Haliah, & Nirwana. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar dengan Pengendalian Akuntansi Sebagai Pemoderasi. AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(4), 430–442. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i4.11>